



KOMPAS.COM/ANDREAS LUKAS ALTOBELI

**HADIR** - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menghadiri sidang tahunan MPR RI Tahun 2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Roy Suryo kini terus jadi perbincangan terkait polemik 3.336 barang milik negara yang diduga masih belum dikembalikan saat menjadi Menpora.

## Tuntaskan Polemik

**KOORDINATOR** Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyarankan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo untuk segera menuntaskan polemik dengan Kemenpora terkait persoalan 3.226 barang milik negara yang nilainya sekitar Rp 8 miliar-Rp 9 miliar itu.

"Harusnya Roy Suryo se-

baiknya kooperatif ya, kalau memang itu ada. Sekali lagi, kalau memang itu ada. Sebab, sulit kalau pemerintah itu menuding (Roy Suryo) tanpa sesuatu dasar," kata Donal di DPP PSI, Jakarta, Senin (10/9).

Sebab, kata Donal, permintaan dari Kemenpora tersebut berdasarkan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga sulit

bagi Roy maupun pihak terkait lainnya untuk mengabaikan audit BPK.

"Jadi, bukan suara dari pemerintah, tapi audit BPK. Pada titik itu, sulit bagi Roy Suryo untuk mengelak karena hasil audit itu dari BPK," ujarnya.

Donal juga menuturkan, seharusnya Roy bergerak cepat tanpa menunggu instruksi Ketua Umum Par-

tai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memberikan waktu tujuh hari kepada Roy untuk menuntaskan polemik tersebut.

"Seharusnya kan kooperatif tanpa harus menunggu instruksi SBY. Menurut saya, sebaiknya kooperatif agar permasalahan ini selesai," katanya.

Ia menyatakan, apabila polemik ini tak dituntaskan dengan cepat, akan berdampak negatif bagi Demokrat, publik, dan penyelenggara negara. "Tidak bagus bagi partainya, dan jadi preseden buruk bagi publik dan pejabat negara. Besok-besok orang habis jadi kepala dinas, misalnya, ambil saja mobil dinas. Kan bisa begitu," kata dia.

(kompas.com)